



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. RA. Kartini No. 160 Plumbungan, Karangmalang, Sragen

Website: www.disnaker.sragenkab.go.id, Email: disnaker@sragenkab.go.id

Telp. (0271)890645



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA TAHUN 2025

*
*
*
*
*
*

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN
2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Sragen, 18 Juli 2024

Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen



Agus Winarno, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
LAMPIRAN	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	10
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA.....	10
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan	10
Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah.....	35
2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD.....	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III	51
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA.....	51
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja	53
3.3. Program dan Kegiatan.....	54
BAB IV.....	59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA.....	59
BAB V	68
PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN.....	18
TABEL 2. 2	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA.....	32
TABEL 2. 3	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA	33
TABEL 2. 4	REVIEW TERHADAP RECANA KERJA RKPD TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN.....	38
TABEL 2. 5	REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025 UPTD GANESHA TECHNOPARK SUKOWATI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN.....	49
TABEL 2. 6	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025.....	50
TABEL 3. 1	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA	54
TABEL 4. 1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN SRAGEN.....	59

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Nomor 675/ 6281 tentang Perubahan Alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), salah satunya adalah dengan cara mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, setiap Perangkat Daerah harus berperan aktif, termasuk dalam hal menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik, maka sangat diperlukan suatu dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik yang kinerjanya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan di dalamnya termasuk penyusunan Rencana kerja Renja Perangkat Daerah.

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakeholders atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2023, dan hasil evaluasi proyeksi Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

3. Keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan

Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, terdapat indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja serta indikator kinerja penunjang yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran yang mendukung misi keempat “Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja” yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan sasaran ke 4.2 yaitu “Menurunnya angka pengangguran”.

Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026. Didalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026, dirumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Pengurangan Pengangguran”. Hal ini selaras dengan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen, yaitu dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sragen. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana

Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, antara lain mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagian telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagian telah diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 32/MEN/ XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.
20. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).
24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2025 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen jangka pendek yaitu dalam jangka 1 (satu) tahun;
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;
4. Mewujudkan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen;
5. Menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Sragen selama tahun 2025;

3. Menjadi pedoman monitoring dan evaluasi pencapaian target Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;
4. Mewujudkan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra*

Penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tahun sebelumnya, yang disandingkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023.

Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 12.287.710.016,00 (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.784.674.259 (Sebelas juta tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 86,51 %.

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen tersebut, terdapat beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan target, yaitu diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3.1 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.2 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Penempatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pada Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 4.1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja di Tahun 2023, terdapat beberapa program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4 Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 2.2 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - 2.3 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - 2.4 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023, terdapat sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan capaian kinerja melebihi target, yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 1.1 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 1.2 Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Hubungan Industrial
 - 2.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Program/ Kegiatan yang Terpenuhi, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah serta kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan awal, selain itu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, meliputi kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan tersebut di tahun 2023 terlaksana sesuai perencanaannya, didukung dengan adanya sumber dana dan sumber daya manusia yang baik dalam pelaksanaannya.

- 2) Program/ Kegiatan yang Tidak Tercapai, yaitu Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kedua kegiatan tersebut tidak tercapai sesuai dengan rencana dikarenakan adanya penyewaan aset gedung garmen di Dinas Tenaga Kerja yang pada tahun 2023 pembayaran listrik dan airnya dilakukan oleh penyewa, sehingga anggaran juga kinerja telepon listrik dan air tidak bisa terserap 100 %. Selain itu juga dikarenakan adanya penyusutan biaya pajak kendaraan di Dinas Tenaga Kerja juga menjadi faktor penyebab target kegiatan tidak tercapai.

Pada Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, kegiatan yang belum tercapai adalah kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dimana didalam kegiatan tersebut terdapat pelatihan Tumis serta pelatihan DBHCHT. Didalam pelatihan tumis, bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa kambing dialihkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan karena bukan merupakan tupoksi Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan untuk pelatihan DBHCHT, bantuan peralatan yang diserahkan kepada masyarakat disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan peralatan di masyarakat sehingga kinerja maupun anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Program penempatan tenaga kerja yang belum memenuhi target kinerja yaitu kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Kedua kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai target dikarenakan Dinas Tenaga Kerja melakukan efisiensi anggaran pada makan dan minum rapat juga honor narasumber dikarenakan narasumber yang awalnya direncanakan dari Kementerian Tenaga Kerja, namun pada pelaksanaannya narasumber berhalangan digantikan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS, beberapa BKK di Kabupaten Sragen pada tahun 2023, yaitu BKK SMK terdapat program sekolah unggulan dari dana APBN. Sekolah tersebut mengadakan penguatan kelembagaan dan job fair dengan mengundang Dinas Tenaga Kerja sebagai narasumbernya, sehingga secara anggaran tidak terserap 100 %.

Selanjutnya untuk Program Penempatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pada Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk program ini terdapat kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Didalam kegiatan ini, dikarenakan pada perencanaan banyaknya transmigran yang akan dikirim sebanyak 2 KK, tetapi pada pelaksanaannya hanya

mengirim 1 KK ke lokasi transmigrasi yaitu di Desa Kahingai, Kec. Belantikan Raya, Kab.Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 675/ 6281 tentang Perubahan Alokasi Perpindahan dan Perpindahann Transmigran Tahun 2023.

- 3) Program/ Kegiatan yang melebihi target di Tahun 2023 antara lain Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja didukung oleh sub Kegiatan Job Fair. Pada tahun 2023, pelaksanaan Job Fair yang diadakan pada tanggal 27-28 Juni 2023, di ikuti oleh 46 perusahaan baik perusahaan didalam kota maupun luar kota Sragen, dengan pengunjuk sebanyak 3.408 orang berhasil menempatkan sebanyak 929 orang dari target penempatan sebanyak 500 orang.

Sedangkan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota, didukung oleh sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran. Dalam sub kegiatan ini terdapat 2 bentuk kegiatan yaitu penanganan kasus dan penyediaan rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran. Pada Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja menangani 4 kasus kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan untuk rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dengan dibukanya kembali negara tujuan setelah pandemi Covid-19, banyak Calon Pekerja Migran Indonesia yang mencari rekomendasi paspor bekerja keluar negeri.

Sedangkan untuk Program Hubungan Industrial, pencapaian kegiatan melebihi target, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kedua kegiatan ini didukung oleh adanya perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama di tahun 2023 melebihi dari target yang direncanakan. Pada tahun 2023 direncanakan penyusunan perjanjian kerja bersama ini sebanyak 2 perusahaan. Pada pelaksanaannya, ditahun 2023 terdapat 4 perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama.

Selain itu, juga didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit. Pada tahun 2023, direncanakan pembinaan dilakukan kepada 30 lembaga, sedangkan pada pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan kepada 100 lembaga.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Capaian dari sub kegiatan-sub kegiatan yang belum memenuhi target berimplikasi pada hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja menetapkan target yang harus dicapai yaitu 70,24 %. Sedangkan di Tahun 2023, tingkat capaian TPAK tercapai 68,60 % dengan tingkat capaian sebanyak 97,66 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021- 2026 yang telah ditetapkan, yaitu nilai TPAK sebanyak 72,74 %. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2023 tingkat capaian yang berhasil dicapai adalah sebesar 94,41 % dari target IKU di akhir Renstra.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

- 1) Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Kebijakan perencanaan dan penganggaran seharusnya berbasis kinerja untuk mendukung Indikator Kinerja Utama, sehingga perencanaan anggaran lebih terarah dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan;
- 3) Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat pemangku kebijakan tertinggi sampai pelaksana teknis kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif saja agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
- 4) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti:
 - a) Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
 - b) Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;
 - c) Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
 - d) Cascading yang tidak tepat;
 - e) Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
 - f) Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tabel 2. 1 (Tabel T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah(%)	100	-	100	100	100	200	2
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(%)	100	-	100	100	100	200	2
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah(dokumen)	5	-	5	5	100	5	2
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat	100	100	100	100	100	300	300.00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)			
					Daerah(%)								
2	07	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan)	58	68	68	100	68	92	150.82 %
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah(persen)	100	100	100	100	100		0.00%
2	07	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(paket)	1	12	1	1	100	1	2500.0 0%
2	07	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)	1	12	1	1	100	1	2500.0 0%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	1	12	1	1	100	1	2500.0 0%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	1	12	1	1	100	1	2500.0 0%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	1	12	1	1	100	1	208.33 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d tahun berjala n(2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	2	2	1	1	100	1	3	25.00 %
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(persen)	100		100	91,67	91,67	100		0.00%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	1	12	1	0,75	75	1	25	208.33 %
2	07	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan (laporan).	1	12	1	1	100	1	25	208.33 %
2	07	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(laporan)	1	12	1	1	100	1	25	208.33 %
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(persen)	100		100	95	95	100		0.00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
2	07	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)	45	12	45	41	91,11	45	69	153.33 %
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi(unit)	2	12	1	1	100	1	14	700.00 %
2	07	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Capaian Standart Pelayanan Minimal(persen)			100	100	100	100		
2	07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(unit)	1	30	1	1	100	1	61	203.33 %
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun(persen)	100	100	100	100	100	100		
2	07	02	2.10		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65	6,25	60	60	100	65		
2	07	02	2.10	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana	1	1	1	1	100	1	3	300.00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d tahun berjala n(2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renst ra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
					Tenaga Kerja Makro(dokumen)								
2	07	02	2.10	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro(orang)	5	-	5	5	100	10	50.00 %
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI(persen)	55	45	50	49	98	50	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi(persen)	90	90	90	81,90	91	90	
2	07	03	2.01	01	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n(orang)	556	448	700	717	102,43	288	117.18 %
2	07	03	2.01	02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n(lembaga)	1	16	1	1	100	1	1700.0 0%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d tahun berjala n(2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta(persen)	100	50	50	50	100	50		
2	07	03	2.02	01	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina(lembaga)	30	30	30	30	100	30	90	300.00 %
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja(persen)	100	33	41	41	100	41		
2	07	03	2.03	01	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi(perizinan)	5	5	5	5	100	5	10	200.00 %
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil(persen)	100	100	100	100	100	100	200	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas(perusahaan)	41	118	50	50	100	50	168	336.00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota(persen)	100	5	10	10	100	10	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah(dokumen)	1	120	1	1	100	1	12100.00%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja(persen)	66,75	62,92	64,81	77,12	118,99	64,81	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah pencari yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja(persen)	100	100	100	90	90	100	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL(orang)	40	200	120	100	83,33	120	0.00%
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan(orang)	500	100	500	500	100	500	120.00 %
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi	100	40	200	120	60	200	120.00 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d tahun berjala n(2024)	Tingk at Capai an Realis asi Target Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
						Layanan ULD(orang)								
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja(orang)	16	20	16	16	100	60	80	500.00 %
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(persen)	100	100	100	65	65	100		
2	07	04	2.02	01	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi(lembaga)	12	5	12	12	100	12	17	141.67 %
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku(lembaga)	15	70	72	53	73,61	72	142	197.22 %
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Kerja(persen)	100	100	100	130	130	100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaian Progra m dan Kegiatan s/d tahun berjala n(2024)	Tingk at Capaian Realis asi Target Renst ra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online(dokumen)	12	12	12	12	100	12	24	200.00 %
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)(orang)	1500	5000	5000	5373	107,46	5000	14556	291.12 %
2	07	04	2.03	03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja(orang)	500	35	500	929	185,80	500	535	107.00 %
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100	100	100	190	190	100		
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan(orang)	10	48	16	16	100	16	74	462.50 %
2	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani(orang)	500	200	200	200	100	500	700	140.00 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7 +9)	11(10 /4)
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan(orang)	10	16	10	10	100	10	26	260.00 %
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP(persen)	80	70	75	129	172	75		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjajanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)(persen)	40	40	40	133	332,50	40		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online(perusahaan)	5	5	5	5	100	5	10	200.00 %
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama(perusahaan)	2	2	2	4	200	2	4	80.00 %
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan(laporan)	70	70	70	70	100	70	170	242.86 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial(persen)	100	100	100	125	125	100	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah(perkara)	25	25	25	25	100	25	320.00 %
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan(perkara)	25	25	25	25	100	25	320.00 %
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi(asosiasi dan SP)	10	74	74	100	135,14	74	200.00 %
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina(lembaga)	30	30	30	100	333,33	30	200.00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
2	07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(orang)	100	10	100	100	100	100	110	110.00 %
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	32	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan(persen)	65	50	100	75	75	100		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigrasi(persen)	100	50	100	75	75	100		
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota(laporan)	1	1	2	2	100	2	3	150.00 %
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan (KK)	1	1	2	1	50	2	3	150.00 %

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat at Daerah tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)

Sragen, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sragen

Agus Winarno, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19710313 199803 1 008

KETERANGAN :
n : Tahun perencanaan (2025)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen pada tahun 2021–2026 menentukan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator tujuan penunjang, indikator sasaran penunjang, dan indikator program yang terkait dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Indikator Sasaran	:	Tingkat produktivitas tenaga kerja
Indikator Tujuan Penunjang	:	Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Penunjang	:	Predikat kinerja SAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen.

2.2.1 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Sebelumnya

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN DUA TAHUN SEBELUMNYA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Tujuan strategis: Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	69,18	71,74	96,29	69,92	69,40	99,25	70,24	68,60	97,66
2	Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap kerja	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (Rp/Perkapita)	8,249	8,289	100,47	8,250	6,149	74,53	8,251	5,840	70,77
3	Sasaran Penunjang: Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	-	-	-	70,20 (BB)	65,52 (B)	93,33	70,30 (BB)	68,60 (B)	97,58

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2023 dibanding dengan dua tahun sebelumnya. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya, analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 99,25 % lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 96,29 %. Sedangkan di tahun 2023, pencapaian kinerjanya menurun sebesar 97, 66 % dengan penurunan sebesar 1,59 %.

Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran strategis yaitu Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan kinerja. Pada tahun 2021 pencapaian kinerja sebesar 100,47 %, namun ditahun 2022 realisasi capaian kinerja sebesar 74,53 % dan di tahun 2023 realisasi capaian kinerja sebesar 70,77 %. Terjadi penurunan

realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis dari tahun ke tahun.

Perbandingan kinerja capaian realisasi indikator sasaran penunjang yaitu predikat SAKIP dari tahun 2022 sebesar 65,52 (B), mengalami kenaikan di tahun 2023 yaitu sebesar 68,60 (B).

2.2.2 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 2. 3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN
TARGET AKHIR RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA			
			TARGET TAHUN 2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Tujuan strategis: Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	72,74 %	68,60 %	94,30 %	BAIK
2	Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap kerja	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (Rp/Perkapita)	8,254 Milyar Rupiah	5,840 Milyar Rupiah	70,75 %	AKAN TERCAPAI
3	Sasaran Penunjang: Sasaran Penunjang: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	70,60 (BB)	68,60 (B)	97,16 %	BAIK

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2023 dengan target Akhir Renstra tahun 2026. Target akhir renstra bukanlah target komulatif, sehingga kondisi yang akan dihitung adalah kondisi pada akhir renstra/tahun 2026. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di

atas dapat disimpulkan dari sudut pandang organisasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sudah berada pada jalur yang tepat (*on the right track*) untuk mencapai target akhir renstra.

Dinas Tenaga Kerja sebagai organisasi perangkat daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja didukung dengan adanya 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan UPTD Ganesha Technopark Sukowati, yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat dengan 19 instruktur.

Dalam upaya mengurangi pengangguran dilakukan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ganesha Technopark Sukowati Sragen di Tahun 2023. UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2023, melaksanakan pelatihan kepada 192 orang. Sedangkan UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen di Tahun 2023 memberi pelatihan kepada 240 orang. Selain pelatihan yang dilakukan oleh UPTD BLK maupun UPTD Ganesha Technopark Sukowati, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga memberikan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan tuntas kemiskinan (tumis), pelatihan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) kepada 400 orang.

Sesuai dengan data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja tahun 2023, yaitu pencari kerja yang mencari kartu kuning sebanyak 5.737 orang. Dari jumlah tersebut di tahun 2023, tenaga kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak 4.214 orang. Penempatan di tahun 2023 ini terdiri dari penempatan AKL (antar kerja lokal), AKAD (antar kerja antar daerah), dan AKAN (antar kerja antar negara). Pada Tahun 2023, tenaga kerja AKAN tersebut, yang biasa disebut dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang melakukan pendaftaran rekomendasi paspor di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2190 orang dengan tujuan berbagai negara. Hal ini lebih banyak

jika dibanding tahun 2022, yaitu sebanyak 2141 orang. Penempatan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sragen ini tidak terlepas dari peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dan pelaksanaan Job Fair yang dilaksanakan. Data BKK yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen di tahun 2023 sebanyak 54 lembaga. Selain BKK yang dibina juga terdapat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina. Pada tahun 2022 terdapat 54 LPK di Kabupaten Sragen, dan ditahun 2023 LPK yang ada di Kabupaten Sragen sebanyak 65 LPK.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga melakukan pembinaan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Sragen dalam upaya mengurangi perselisihan yang terjadi. Jumlah perusahaan terdaftar, baik perusahaan kecil, sedang dan terdaftar di tahun 2023 sebanyak 562 perusahaan. Dari perusahaan tersebut, sebanyak 117 perusahaan telah menerapkan tata kerja kelola yang layak. Perselisihan yang dapat diselesaikan baik perselisihan hak pekerja maupun kepentingan yang diselesaikan baik secara mediasi maupun bipartit sebanyak 11 perselisihan.

2.3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tusi Perangkat Daerah*

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sragen masalah yang sering dihadapi adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, buruh industri kecil dan sektor UMKM.

Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan urusan tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Sragen. Isu-isu terkait ketenagakerjaan diantaranya adalah:

1. Rendahnya peningkatan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dalam dunia kerja.

2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, etos kerja dan kedisiplinan tenaga kerja.
3. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usaha rumahan.
4. Rendahnya animo Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk melakukan akreditasi sehingga mutu LPK diragukan
5. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
6. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
7. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan.
8. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja.
9. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan.
10. Rendahnya jumlah penempatan calon transmigran ke daerah tujuan transmigrasi dibandingkan animo calon transmigran.

2.4. Review terhadap Rencana kerja RKPD

Rencana kerja Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD Kabupaten Sragen. Dalam Rencana kerja RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen mengusulkan untuk melaksanakan 6 (enam) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 10.926.657.777,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan BPHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) . Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen juga membawahi UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen, dimana UPTD Ganesha Technopark Sukowati di tahun 2025 mengusulkan untuk melaksanakan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan yang mengelola anggaran sebesar Rp 75.000.000,00

(Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sumber dana dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 2. 4 (Tabel TC-31)
REVIEW TERHADAP RECANA KERJA RKPD TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.427.770.510	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.844.399.077	
2	07	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	5.000.000	
2	07	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	
2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.651.116.474	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.035.215.579	
2	07	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.651.116.474	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.035.215.579	
2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	184.240.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	194.203.400	
2	07	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik	Disnaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	15.000.000	

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						/penerangan bangunan kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			/penerangan bangunan kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
2	07	01	2.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	44.204.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	54.203.400	
2	07	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	25.000.000	
2	07	01	2.06	05		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
2	07	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000	
2	07	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Disnaker	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	10.000.000	
2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.215.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.214.999.000	
2	07	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	Penyediaan jasa komunikasi dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	470.000.000	
2	07	01	2.08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	15.000.000	

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	730.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	729.999.000	
2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	415.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	394.981.098	
2	07	01	2.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	190.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	250.000.000	
2	07	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	225.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	144.981.098	
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	25.400.301	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100 %	25.399.700	
2	07	02	2.10			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20 %	25.400.301	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Disnaker	Prosentase Lembaga / Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	20%	25.400.301	

Kode							Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	02	2.10	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	15.400.301	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	15.400.000		
2	07	02	2.10	02		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 perusahaan	10.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 orang	9.999.700		
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60 %	708.810.900	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase peserta pelatihan yang terserap DUDI	60 %	1.520.272.000		
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95 %	487.499.100	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Prosentase Peserta Lulus Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	95 %	1.277.700.100		
2	07	03	2.01	01		Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab Sragen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	380 orang	477.700.100	Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab Sragen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	564 orang	477.700.100		
2	07	03	2.01	02		Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	1 lembaga	10.000.000	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Disnaker	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	1 lembaga	10.000.000		

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Produktivitas pada Tahun n					Produktivitas pada Tahun n			
2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	10.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Prosentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swast	50 %	10.000.000	
2	07	03	2.02	01		Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 lembaga	10.000.000	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 lembaga	20.000.000	
2	07	03	2.03			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	57 %	10.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker	Prosentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.	57 %	9.999.900	
2	07	03	2.03	01		Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	10.000.000	Penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 perizinan	9.999.900	
2	07	03	2.04			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	181.572.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	187.572.000	
2	07	03	2.04	01		Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	41 perusahaan	181.572.000	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Disnaker	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan	187.572.000	
2	07	03	2.05			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	25.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	10 %	25.000.000	

Kode						Rencana kerja RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	07	03	2.05	01		Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	25.000.000	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Disnaker	Prosentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1 dokumen	25.000.000		
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	68,76 %	316.081.400	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	68,76 %	326.724.000		
2	07	04	2.01			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Jumlah pencari yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	34.606.400	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Jumlah pencari yang terfasilitasi Pelayanan Antarkerja	100 %	38.401.000		
2	07	04	2.01	02		Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 orang	8.951.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 orang	8.951.000		
2	07	04	2.01	03		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	11.456.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 orang	15.450.000		
2	07	04	2.01	04		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 orang	8.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 orang	4.000.000		
2	07	04	2.01	05		Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	10.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 orang	10.000.000		
2	07	04	2.02			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	100 %	17.636.000	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	Disnaker	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)	100 %	17.636.000		

Kode						Rencana kerja RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota				
2	07	04	2.02	01		Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnaker	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lembag a	8.726.000	Penyediaan sumber daya perizinzn LPTKS secara terintegrasi	Disnake r	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 lemba ga	8.726.000		
2	07	04	2.02	02		Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnaker	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 lembag a	8.910.000	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	Disnake r	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 lemba ga	8.910.000		
2	07	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	223.000.00 0	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnake r	Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	223.000.000		
2	07	04	2.03	01		Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 dokume n	8.000.000	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Disnake r	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 doku men	8.000.000		
2	07	04	2.03	02		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnaker	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 orang	15.000.000	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Disnake r	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 orang	15.000.000		
2	07	04	2.03	03		Job Fair / Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	200.000.00 0	Job Fair / Bursa Kerja	Disnake r	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	500 orang	200.000.000		
2	07	04	2.04			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	47.687.000	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Disnake r	Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI	100 %	47.687.000		

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	04	2.04	01		Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	24.176.000	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Disnaker	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	10 orang	24.176.000	
2	07	04	2.04	02		Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	8.511.000	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Disnaker	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	500 orang	8.511.000	
2	07	04	2.04	03		Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	15.000.000	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Disnaker	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 orang	15.000.000	
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85 %	159.560.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Disnaker	Cakupan Perusahaan yang telah membuat PP (Peraturan Perusahaan)	85 %	169.863.000	
2	07	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	40.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP)	40 %	31.903.000	
2	07	05	2.01	01		Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	Pengesahan peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	6.903.000	

Kode						Rencana kerja RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	07	05	2.01	02		Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 perusahaan	5.000.000	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Disnaker	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 perusahaan	5.000.000		
2	07	05	2.01	03		Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	20.000.000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Disnaker	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 laporan	20.000.000		
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	129.560.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Perusahaan yang terfasilitasi penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial	100 %	137.960.000		
2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	21.750.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 perkara	21.750.000		

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	2.02	02		Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	15.450.000	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	25 perkara	15.450.000	
2	07	05	2.02	03		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 asosiasi dan Serikat Pekerja	10.000.000	
2	07	05	2.02	04		Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 lembaga	75.360.000	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30 lembaga	75.360.000	
2	07	05	2.02	05		Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	15.400.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 orang	15.400.000	
3																
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Disnaker				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Disnaker				
3	32	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Disnaker				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Disnaker				

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	32	03	2.01			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Disnaker	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	40.000.000 0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Disnake r	Prosesntase Transmigran yang ditempatkan	100 %	40.000.0000	
3	32	03	2.01	01		Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	40.000.000 0	Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnake r	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigras	100 %	40.000.0000	
3	32	03	2.01	04		Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	15.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnake r	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lapora n	10.000.000	
5	07	03	2.02			Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	30.000.000	Pemindahan dan penempatan transmigrans yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnake r	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 KK	30.000.000	

Tabel 2. 5 (Tabel TC-31)
REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025 UPTD GANESHA TECHNOPARK SUKOWATI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SRAGEN

Kode						Rencana kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah			
2	07	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Disnaker	Prosentase capaian standart pelayanan minimal BLUD	100%	75.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Disnaker	Prosentase capaian standart pelayanan minimal BLUD	100%	75.000.000	
2	07	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	75.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Disnaker	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	75.000.000	Sumber: Pendapatan BLUD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun setelah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Dari hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tersebut hasilnya tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen.

Tabel 2. 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, *"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*. Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden; poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2020- 2024 tersebut yaitu:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan, dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Ketenagakerjaan.

Upaya Kementerian Ketenagakerjaan tersebut selaras dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu dalam merumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Pengurangan Pengangguran”. Sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja.
6. Meningkatkan penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
8. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Sragen yakni “***Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera Dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong***”. Didalam renja tahun 2025 merupakan tahap keempat atau tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Mengacu pada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan juga dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Sragen khususnya misi ke-4 (empat), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen memuat 6 (enam) program prioritas, yaitu diantaranya:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial;
- 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sragen , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen berkontribusi dalam pencapaian misi keempat dalam RPJMD Kabupaten Sragen yaitu **“Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja ”**. Untuk Mencapai itu Dinas tenaga kerja Kabupaten Sragen berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: **“ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja. ”**

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen adalah “ **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Yang Siap Kerja** “.

Tujuan, indikator tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

Tujuan	:	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Tujuan	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang siap kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, strategi yang ditempuh Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur.
2. Peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan.
3. Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
4. Peningkatan pengawasan tentang norma ketenagakerjaan.
5. Peningkatan mitra usaha khususnya mitra tenaga kerja dalam ketenagakerjaan dan penyaluran tenaga kerja.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Direncanakan pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen akan melaksanakan 6 Program, 19 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp.11.609.485.259,- (Sebelas milyar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dengan kegiatan :

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor.
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - f) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

1. Peningkatan Pelayanan BLUD

- a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

- a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.
- b) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

3) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

- a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
- b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

- a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota

- a) Pelayanan antar Kerja
- b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- c) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- d) Perluasan Kesempatan Kerja

2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota

- a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi

- b) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

3. *Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*

- a) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- b) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- c) Job Fair/Bursa Kerja

4. *Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota*

- a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/PMI
- b) Penyediaan layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran
- c) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) Program Hubungan Industrial

1. *Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- b) Pendaftaran Perjanjian kerjasama bagi perusahaan
- c) Penyelenggaraan pendataan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan.

2. *Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota*

- a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- d) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- e) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Urusan Pilihan)

- 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten Kota*
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sragen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Kabupaten Sragen						
07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA		100 %	8.844.399.077			100 %	10.023.108.000
07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5.000.000	DAU		100 %	10.000.000
07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	5.000.000	DAU		5 dokumen	10.000.000
07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	7.035.215.579	DAU		100 %	8.000.000.000
07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		58 Orang/bulan	7.035.215.579	DAU		58 Orang/bulan	8.000.000.000
07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	194.203.400	DAU		100 %	384.108.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	20.000.000
07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	54.203.400	DAU		1 Paket	213.108.000
07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	20.000.000
07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	15.000.000	DAU		1 Paket	10.000.000
07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	75.000.000	DAU		12 Laporan	75.000.000
07 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	10.000.000	DAU		12 Dokumen	10.000.000
07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.214.999.000	DAU		100 %	1.275.000.000
07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	470.000.000	DAU		1 Laporan	470.000.000
07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	15.000.000	DAU		12 Laporan	15.000.000
07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	729.999.000	DAU		12 Laporan	790.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	394.981.098	DAU		100 %	390.000.000
07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 Unit	250.000.000	DAU		45 Unit	190.000.000
07	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	144.981.098	DAU		2 Unit	200.000.000
07	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian Standart Pelayanan Minimal BLUD		100 %	75.000.000	DAU		100 %	75.000.000
07	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	75.000.000	DAU		1 Unit Kerja	75.000.000
07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			100 %	25.399.700	DAU		100 %	90.000.000
07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase lembaga/ perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)		100 %	25.399.700	DAU		100 %	90.000.000
07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		1 Dokumen	15.400.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		5 orang	9.999.700	DAU		5 orang	60.000.000
07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			60 %	1.520.272.000	DAU,		60 %	1.200.000.000
07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Peserta lulus Peatihan Berdasarkan Unit		95 %	1.277.700.100	DAU		95 %	660.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Kompetensi							
07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	564 Orang	1.267.700.100	DAU		380 Orang	650.000.000
07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	10.000.000	DAU		1 Lembaga	10.000.000
07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50 %	20.000.000	DAU		50 %	50.000.000
07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 lembaga	20.000.000	DAU		30 lembaga	50.000.000
07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	57 %	9.999.900	DAU		57 %	10.000.000
07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	9.999.900	DAU		5 Perizinan	10.000.000
07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 %	187.572.000	DAU		100 %	450.000.000
07	03	2.04	01	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	40 perusahaan	187.572.000	DAU		41 perusahaan	450.000.000
07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas	Prosentase pengukuran produktivitas tingkat daerah	10 %	25.000.000	DAU		10 %	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota						
07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		68,76 %	326.724.000	DAU		68,76 %	1.418.000.000
07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah pencaker yang terfasilitasi Pelayanan Antar Kerja	100 %	38.401.000	DAU		100 %	233.000.000
07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang	8.951.000	DAU		40 Orang	88.000.000
07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	15.450.000	DAU		500 Orang	125.000.000
07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	4.000.000	DAU		100 Orang	10.000.000
07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	10.000.000	DAU		16 Orang	10.000.000
07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	17.636.000	DAU		100 %	85.000.000
07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	12 Lembaga	8.726.000	DAU		12 Lembaga	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07 04 2.02 02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku		30 Lembaga	8.910.000	DAU		30 Lembaga	25.000.000
07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Prosentase Penyusunan Dokumen Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100 %	223.000.000	DAU		100 %	230.000.000
07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		12 Dokumen	8.000.000	DAU		12 Dokumen	25.000.000
07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1500 Orang	15.000.000	DAU		1500 Orang	75.000.000
07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		500 orang	200.000.000	DAU		500 orang	130.000.000
07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Prosentase Tenaga Kerja Tefasilitasi Pelindungan PMI		100 %	47.687.000	DAU		100 %	870.000.000
07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		10 orang	24.176.000	DAU		10 orang	830.000.000
07 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		500 Orang	8.511.000	DAU		500 Orang	25.000.000
07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		10 Orang	15.000.000	DAU		10 Orang	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				85 %	169.863.000	DAU		85 %	220.000.000
07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				40 %	31.903.000	DAU		40 %	50.000.000
07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				5 Perusahaan	6.903.000	DAU		5 Perusahaan	5.000.000
07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				2 Perusahaan	5.000.000	DAU		2 Perusahaan	5.000.000
07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				25 Laporan	20.000.000	DAU		25 Laporan	20.000.000
07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				100 %	137.960.000	DAU		100 %	170.000.000
07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja,				25 Perkara	21.750.000	DAU		25 Perkara	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	25 Perkara	15.450.000	DAU		25 Perkara	20.000.000
07	05	2.02	03	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	15 Asosiasi dan SP	10.000.000	DAU		15 Asosiasi dan SP	20.000.000
07	05	2.02	04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/ kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibangun	30 lembaga	75.360.000	DAU		30 lembaga	85.000.000
07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	100 orang	15.400.000	DAU		100 orang	10.000.000
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				DAU			
32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				DAU			
32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Transmigran yang ditempatkan	100 %	40.000.000	DAU		100 %	100.000.000
32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Lokasi penyediaan Permukiman transmigrasi	100 %	40.000.000	DAU		100 %	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RencanaTahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	50.000.000
32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		1 Kepala Keluarga	30.000.000	DAU		1 Kepala Keluarga	50.000.000

Sumber Data : RKPd Kabupaten Sragen Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti berikut:

1. Pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen sebesar Rp 10.926.657.777,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
2. UPTD Ganesha Technopark Sukowati Sragen, mengelola anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sumber dana dari pendapatan BLUD.
3. Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini mewajibkan konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan segenap *stakeholders* untuk melaksanakan rencana kerja ini.
4. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat Rencana Kerja ini dibuat, baik yang bersifat memperlambat maupun mempercepat pencapaian sasaran kinerja, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dan ditetapkan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sragen, 18 Juli 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN

AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710313 199803 1 008

DEFINISI OPERASIONAL

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

c. AKAD

AKAD adalah singkatan dari daerah Antar Kerja Antar Daerah

d. AKAN

AKAN adalah singkatan dari Antar Kerja Antar Negara

e. AKL

AKL adalah singkatan dari Antar Kerja Lokal

f. CPMI/ PMI

CPMI/ PMI adalah singkatan dari Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia

g. P3MI

P3MI adalah singkatan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

h. BLUD

BLUD adalah singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah

i. UPTD

UPTD singkatan dari Unit Pengelola Teknis Daerah



**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SRAGEN**